

PEMBELAJARAN NILAI KEBANGSAAN DALAM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

**(Kajian Epistemologik dan Paradigmatik Pendidikan Ideologi Pancasila dan
Pembelajaran Nilai Kebangsaan Indonesia**

Suwarma Al Muchtar
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
e-mail : suwarma@gmail.com

Disampaikan dalam Seminar Nasional “Penguatan Nilai – Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan” pada 7
Juli 2018

ABSTRACT

This study deals with how to build academic thinking for the revitalization of Civic Science, civic education and its implications for the Teacher Education system. In connection with the accelerated changes in social cultural values with the development of information technology and communications, develop paradigms and approaches in the social sciences. This study put forward the paradigm of citizenship science revitalization based on the philosophy of Pancasila science. Aims to strengthen Citizenship Education as an educational value of Pancasila ideology, in learning solving the problems of actual citizenship, using information technology and appropriate communication in accordance with the purpose of building a believing citizen, devoted to God Almighty and have noble character

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dari refleksi pengalaman subyektif kajian epistemologik dan paradigmatik memperkokoh eksistensi dan mutu Pendidikan PKn selama ini. Terutama dalam upaya memahami arah revitalisasi *Pembelajaran Nilai kebangsaan Pancasila* dalam PPkn Menemukan sejumlah fenomena dan fakta empirik yang menjadi latar masalah. Antara lain bahwa Perubahan sosial budaya sangat cepat telah menyentuh perubahan sistem nilai, sehingga mempengaruhi terhadap masalah nilai sosial budaya. Kompleksitas masalah sosial semakin menguat ke arah *situasi trubulansi*. Kompleksitas menjadi karakteristik dari latar sosial budaya pendidikan bersifat dinamis sebagai latar Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun dalam perkembangan ilmu sosial termasuk pendidikan, perkembangannya itu tertinggal oleh cepatnya perubahan masyarakat sehingga mengakibatkan kesenjangan, termasuk dalam masalah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Kondisi ini sebagai faktor terjadinya “krisis teori konstekstual” yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang semakin rumit. Secara khusus dalam kajian penguatan kebangsaan, memunculkan masalah bagaimana revitalisasi PKn dalam pembelajaran nilai-nilai kebangsaan? Masalah ini sangat mendesak untuk mengatasi melemahnya wawasan dan kecerdasan berbangsa dari warga negara. Masalah ini dalam teori dan konsep PKn berkaitan dengan pengembangan aplikasi pendekatan PPKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila (Suwarma: 2017). Pendekatan ini untuk memperkuat pula konsep dan pendidikan Etika Pancasila dalam PPKn. Kondisi ini mempengaruhi terhadap pengembangan *epistemologi Ilmu Kewarganegaraan* dan Pendidikan Kewarganegaraan, dalam menghadapi dampak pengaruh berbagai ideologi asing, didasarkan atas dasar paradigma bahwa warga negara dapat melakukan penguatan nilai kebangsaan sehingga memiliki kecerdasan berideologi, jika memperkuat pendekatan PPKn sebagai pendidikan ideologi Pancasila, serta terintegrasi dengan pendekatan pendidikan politik Pancasila. Dengan demikian akan mempekokoh kompetensi warganegara sebagai subyek dalam upaya memperkuat kecerdasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu globalisasi melahirkan dampak negatif ancaman globalisasi bagi Indonesia sebagai negara berkembang adalah menipisnya nilai kebangsaan, Bergesernya nilai nasionalisme dan menjauhnya jati diri bangsa dari akar budaya bangsa. Kita tidak seperti Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok yang jadi modern dengan tetap memberikan ruang hidup bagi akar-akar tradisional.

Konsep Global citizenship education (GCE) tengah dikembangkan di negara Barat dengan paradigma bahwa Global citizenship education (GCE) is a form of civic learning that involves students' active participation in projects that address global issues of a social, political, economic, or environmental nature. The two main elements of GCE are 'global consciousness'; the moral or ethical aspect of global issues, and 'global competencies', or skills meant to enable learners to compete in the global jobs market. The promotion of GCE was a response by governments and NGOs to the emergence of supranational institutions, regional economic blocs, and the development of information and communications technologies. These have all resulted in the emergence of a more globally oriented and collaborative approach to education. UNESCO just released its new guidance tool Preventing violent extremism through education: A guide for policy-makers. The new publication will help policy-makers within ministries of education prioritize, plan and implement effective actions for the prevention of violent extremism through education, and contribute to national prevention efforts. (Suwarma : 2017). PPKn dihapakan kepada fenomena tersebut perlu memperkuat peran dalam upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan. Paradima penguatan nilai-nilai kebangsaan dari diemnsi pendidikan nilai dengan menemukan kembali sumber nilai penguatannya, Dalam kajian ini diyakini bahwa masyarakat dan dalam konsepsi negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan agama sebagai sumber Nilai-nilai kebangsaan.

Diyakini pula bahwa kekuatan nilai kebangsaan berdasarkan nilai dasar dan ideologi negara merupakan kekuatan dalam menghadapi dampak negatif globalisasi terhadap nilai kebangsaan, kenegaraan dan kewarganegaraan. Implikasi PPKn didapatkan kepada bagaimana upaya penguatan baik dalam pengembangan kurikulum berbasis nilai kebangsaan maupun dalam pembelajaran sebagai pembelajaran nilai kebangsaan untuk membangun kekokohan nilai kebangsaan dan kecerdasan warganegara dalam kehidupan bernegara. Atas dasar paradigma tersebut teridentifikasi sejumlah faktor yang merupakan latar belakang masalah dalam kajian ini, antara lain sebagai berikut;

- a. Dekade terakhir dalam bidang filsafat ilmu terjadi perubahan dengan munculnya pemikiran berdasar pada paham *neopositivisme dan neo strukturalisme* yang memberikan peluang bagi ilmu ilmu sosial termasuk Ilmu Kewarganegaraan untuk melakukan revitalisasi *epistemologinya* dalam membangun jatidiri keilmuannya. Termasuk bagi penataan hubungannya dengan disiplin ilmu lainnya, dalam menghadapi masalah kewarganegaraan dan masalah kebangsaan . Terutama dalam membangun sosok keilmuan yang bergerak dari tradisi pendekatan disipliner yang selama ini masih dominan ke arah interdisiplin, multidisiplin dan antardisiplin, bahkan kontradisiplin. Munculnya pendekatan *naturalistik inquiry* yang diunggulkan dalam ilmu ilmu sosial dan studi sosial serta humaniora dan keberagamaan. Dalam ilmu pendidikan terapan muncul Penelitian Tindakan kelas dalam Ilmu Keguruan serta Lesson studies dan dan SST dan STEM dalam pendidikan IPA dll, sebagai hasil inovasi.
- b. Perubahan terjadi seiring dengan perubahan tatanan global. Neo ideologi muncul yang dalam era gelobalisasi. Mempengaruhi implementasi dan kemurnian aktualisasi ideologi negara-negara berkembang, Termasuk mempengaruhi pula terhadap implementasi dan kemampuan warga negara Indonesia memahami, mengaktualisasikan mempekokoh penguatan *kebangsaan dan ideologi Pancasila*. Masalah ini berkait dengan konsep untukmengapa perlu memperkokoh wawasan kebangsaan seiring dengan memperkokoh dan *memperkuat kecerdasan berideologi* sebagai sarana dalam memperkokoh wawasan kebangsaan. Hal ini diperlukan dalam mempertahankan kedaulatan dan tujuan bernegara dan berbangsa berdasar Pancasila sebagai dasar negara dan Undang Undang Dasar landsan konstitusional berbangsa dan bernegara, terutama dalam menghadapi ancaman pengaruh ideologi asing
- c. PPKn sebagai Civic Education Indonesia dihadapkan pada tantangan memperkuat kemampuan dalam Pengembangan Kurikulum dan pembelajarannya untuk mngatasi kelemahan yang selama ini dalam *pembelajaran nilai kebangsaan* untuk memperkokoh kehidupan bernegara. Untuk itu perlu dibangun paradigma baru dalam memperkuat *pembelajaran nilai kebangsaan Pancasila dalam PPKn*. Pendidikan PPKn sebagai pendidikan nilai ideologi *Pancasila berdasarkan UUD 1945 dalam perspektif pendidikan nilai dan pendidikan ideologi Pancasila*
- d. Kecerdasan berideologi Pancasila diperlukan dalam menghadapi ancaman pengaruh ideologi asing terhadap pemahaman Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara. Adalah merupakan tantangan dalam upaya revitalisasi

epistemologis termasuk dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan nilai kebangsaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat sejumlah masalah yang perlu segera mendapatkan perhatian komunitas Pkn. Terutama berkaitan dengan upaya membangun pemikiran akademik untuk revitalisasi pembelajaran nilai kebangsaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Terutama dalam kaitannya dalam pengembangan model pembelajaran nilai kebangsaan. Antara lain sebagai berikut;

- a. Mengapa perlu dilakukan revitalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan ideologi untuk memperkuat model pembelajaran nilai kebangsaan di Indonesia
- b. Mengapa perubahan nilai sosial budaya, paradigma dalam Ilmu Ilmu sosial perlu dijadikan dasar pemikiran dalam pevitalisisasi Pendidikan PKn sebagai Pendidikan Ideologi untuk memperkuat pembelajaran nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila ?
- c. Mengapa teknologi informasi dan komunikasi perlu diintegrasikan secara tepat guna bagi revitalisasi pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Ideologi Pancasila dengan tujuan untuk membangun kecerdsan berideolgi dalam emperkuat pembelajaran kebangsaan ?
- d. Mengapa filsafat Pancasila perlu dijadikan filsafat Ilmu kewarganegaraan dan landasan membangun teori pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai Ideologi Pancasila dan pembelajaran nilai kebangsaan ?
- e. Mengapa dperlu dikembangkan model pembelajaran nilai kebangsaan berbasis masalah kewaganegaraan konstekstual berbasis Agama, ilmu pengetahuan, masyarakat dan teknologi yang terintegrasi dalam pendekatan pendidikan ideologi Pancasila
- f. Mengapa model pengembangan kurikulum perlu memuat nilai-nilai Pancasila dan masalah pembelajaran nilai kebangsaan dengan menekankan pada tujuan untuk membangun kompetensi warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia dalam mencintai bangsa negaranya

2. KAJIAN PARADIGMA REVITALISASI IIMU KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBEJARAN NILAI NILAI KEBANGSAAN

2.1. Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Ilmu sosial Implikasinya terhadap Revitalisasisi Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan

Telah terjadi perubahan paradigma dalam ilmu ilmu sosial, sebagai korekasi dari positivisme, dan tumbuhnya neopistivisme dan neostruturalisme, dengan berkembangnya naturalistik inquiry dalam memperkokoh epistemologi ilmu ilmu sosial. Perubahan tersebut mempengaruhi terhadap pengemabangan kurkulum dan

pembelajaran dalam Pendidikan Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan Antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut;

- a. perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan sosial budaya, berpengaruh luarbiasa terhadap epistemologi ilmu ilmu sosial termasuk dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada abad 21
- b. Sementara itu pendekatan disiplin, multidispline ke arah pendekatan krosdisiplin, termasuk yang bersifat contradiscipliner, memberikan pengaruh terhadap kurikulum dan pembelajaran PKn sebagai pendidikan ideologi dalam pengembangan nilai –nilai kebangsaan dan berimplikasi terhadap sistem pendidikan guru PKn.
- c. Positivisme memiliki ekstrim yang dapat diselidiki atau diteliti hanyalah yang bersifat empirik realitas, fakta fakta dalam masyarakat. Sementara itu pendidikan nilai menekankan pada kedalam berfikir dalam menemukan kebenaran dan mengkonstruksi makna kebenaran dibalik realitas.
- d. nilai-nilai sosial dapat digeneralisasikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Sementara itu dalam pendidikan nilai pemaknaan kebenaran lebih bersifat konstektual dan berkaitan dengan nilai kearifan lokal termasuk dalam pengembangan pendidikan ideologi dan pembelajaran nilai kebangsaan Pancasila dalam PPKn di Indonesia
- e. positivisme koreksi yang keras, perspektif pemikiran ilmu ilmu sosial budaya. Koreksi memunculkan aliran baru Post Positivisme. konstruktivisme yang dapat dijadikan peluang dalam memeperkokoh pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan ideologi dan pembelajaran nilai kebangsaan

2.2. Pendekatan dalam Ilmu Kewarganegaraan dalam Pengembangan Model Pendidikan Kewarganegaraan

Terdapat pemikiran dalam Ilmu kewarganegaraan yang melahirkan aliran tradisi dan model Pendidikan Kewarganegaraan yang mempengaruhi pemikiran pengembangan di berbagai negara termasuk di Indonesia dalam ragam pendekatan sebagai berikut;

- a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies)
- b. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik bagi dari sosialisai politik dan komunikasi politik
- c. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi, bagian dari ilmu politik inti dari sistem politik
- d. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Hak Azasi Manusia, bagian dari upaya penegakkan HAM.
- e. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Kesadaran berkonstitusi bagian dari sosialisasi hukum Tata Negara
- f. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan Hukum untuk membangun kesadaran hukum bagian dari sosiologi hukum

- g. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Etika politik, bagian dari filsafat politik
- h. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Guru PKN yang mempersiapkan guru profesional Pancasila, bertaraf universitas, bagian dari ilmu keguruan dan ilmu Pendidikan
- i. Pendidikan Kewarga Negara sebagai Pendidikan disiplin ilmu Kewarga Negara, bagian dari ilmu Pendidikan

2.3. Paradigma Pengembangan Pembelajaran Nilai Kebangsaan dalam PPKn Sebagai Pendidikan Nilai Ideologi Pancasila

Kuatnya pendekatan kognitif, mendapat kritik tajam sehingga melahirkan pemikiran baru terhadap perlunya pengembangan kurikulum dan pembelajaran sebagai pendidikan dan pembelajaran nilai. Setelah paham kognitif tidak berhasil mengembangkan kemampuan warganegara untuk membangun sistem nilai. Kemampuan ini sebagai dasar bersikap dan bertindak sebagai warga negara yang baik. Awalnya dikembangkan sebagai pendidikan moral, kemudian dirubah menjadi pendidikan nilai, dan kini dikembangkan menjadi pendidikan karakter. Berikut ini pemikiran hipotetik paradigmatis, sebagai reflektif empirik subyektif ke arah pemikiran revitalisasi dan inovasi sebagai pendidikan ideologi dan pembelajaran nilai kebangsaan Antara lain sebagai berikut;

- a. PKN multi sumber dan kontekstual ilmu pendidikan ilmu keguruan Ilmu Sosial, humaniora, sains teknologi dan agama dan masalah kewarganegaraan dengan mengarah pada pendekatan krosdisiplin untuk kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- b. Globalisasi merupakan latar dan lingkungan dan modal sosial potensial untuk memperkokoh PPKn sebagai pendidikan ideologi Pancasila dan pembelajaran nilai kebangsaan
- c. Proses pembelajaran PPKn, ditransformasikan pada strategi pembelajaran yang pengembangan berfikir dan nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dengan dukungan pengembangan kurikulum dan pembelajaran berbasis masalah kebangsaan dan kewarganegaraan aktual
- d. Era globalisasi merupakan kompetitif global antar bangsa. perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Daya tahan ideologi dan wawasan kebangsaan terletak pada kecerdasan berideologi warganegara. Revitalisasi PKN sebagai Pendidikan Nilai kebangsaan berkaitan dengan memperkuat pendekatan pendidikan Ideologi Pancasila sebagai salah satu pendekatan dalam Ilmu Kewarganegaraan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran nilai kebangsaan, yaitu nasionalisme Pancasila.
- e. Tuntutan terhadap kemampuan dan kompetensi warga negara bertambah semakin tinggi dalam situasi ancaman disintegrasikan serta pengaruh ideologi asing adalah merupakan tantangan untuk memperkokoh pendekatan filosofik Ilmu Kewarganegaraan dalam memberikan landasan teoretik terhadap pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran termasuk dalam

pembelajaran nilai kebangsaan dalam PKN sebagai pendidikan ideologi Pancasila

- f. Masalah utama dalam revitalisasi adalah pemikiran untuk membangun teori dan paradigma baru, sehubungan dengan masalah dan tantangan baru yang menjadi latar Pendidikan Kewarganegaraan.
- g. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Guru PKN yang profesional Pancasila, perlu mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan guru profesional. Adalah merupakan penentu keberhasilan pemikiran revitalisasi dan aktualisasi

2.4. Refleksi Pemikiran Pengembangan PPKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila dan Pembelajaran Nilai Kebangsaan

Penguatan pembelajaran nilai kebangsaan dalam PPKn, menuntut penguatan terhadap pendekatan sebagai pendidikan ideologi Pancasila. Pendidikan Nilai kebangsaan selama ini masih belum optimal dikembangkan, seiring masih menguatnya paham pemikiran positivistik dan behavioristik dan kognitif dalam ilmu pendidikan dan ilmu keguruan serta ilmu sosial humaniora sebagai sumber keilmuan PPKn Berikut catatan reflektif subyektif empirik berkait dengan pengembangan pendidikan nilai kebangsaan dalam PPKn, antara lain sebagai berikut;

- a. pengembangan nilai-nilai kebangsaan hendaknya merupakan bagian penting dalam inovasi pembelajaran nilai dalam PPKn, terutama untuk memperkuat proses pembelajaran dalam mengimbangi pendekatan kognitif dan objectif model dalam pendidikan selama ini dalam praktek pembelajaran. Pendidikan Nilai kebangsaan merupakan proses transformasi dan aktualisasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membangun konsep kebangsaan dan nasionalisme sebagai sumber PPKn di Indonesia.
- b. Pendekatan model pengembangan kurikulum dan pembelajarn konstekstual Nilai kebangsaan memperkuat PPKn untuk pengembangan models pembelajaran nilai nilai kebangsaan untuk memperkokoh wawasan kebangsaan dan kecerdsan berideologi warga negara.
- c. Pembelajaran nilai kebangsaan hendaknya dikembangkan dalam model pembelajaran yang berorientasi pada keterlibatan siswa dalam berpikir dalam kelompok dalam memecahkan masalah kebangsaan. Tujuannya antara mengembangkan kemampuan berpikir reflektif logis atas sejumlah fenomena dan masalah kewarganegaraan dan kebangsaan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Gejala dan fenomena melemahnya komitmen dan kepercayaan terhadap nilai nilai dan wawasan kebangsaan . Merupakan tantangan bagi revitalisasi PPKn dalam perspektif pendidikan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan. Meliputi penguatan pemaknaan kebangsaan dan nasionalisme Pancasila, pengembangan kurikulum, pembelajaran dan pengembangan kemampuan profesional guru PPKn pendekatan bagi pengembangan Sistem pendidikan guru PPKn

- e. Peran PPKn dalam membangun kecerdasan berideologi merupakan kecerdasan ber-Pancasila. Meliputi pemahaman nilai-nilai, kemampuan mengakan nilai dan mengamalkan serta kemampuan memelihara nilai-nilai dan dalam membangun cinta tanah air sebagai nilai dasar kebangsaan dan nasionalisme Pancasila..
- f. Pendidikan Nilai kebangsaan akan berhasil manakala berorientasi pada membangun karakter cinta tanah air intinya karakter beriman kepada Tuhan Yang maha Esa untuk melahirkan warga negara memiliki kecerdasan berakhlak mulia dan berideologi berbangsa dan bernegara.
- g. Krisis pendidikan dan pembelajaran nilai dapat diatasi, dengan meyakini dan merivitalisasi landasan filsafat, teoretik pendidikan ini sebagai pendidikan dan pembelajaran yang didukung dengan kekokohan Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Guru Pendidikan Kewarganegaraan.
- h. Pembelajaran Nilai kebangsaan (teaching nationalism) Masalah aktual kewarganegaraan adalah alternatif solusi pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek kognitif dari pada afektif dan psikomotor.

2.5. Peluang Revitalisasi Pendidikan Ideologi dan Pembelajaran Nilai Kebangsaan dalam Pendidikan Guru PKN di Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan di PT sebagai lembaga pendidikan guru pada Universitas di LPTK di Indonesia, telah memiliki pengalaman dalam membangun guru dan pengembangan Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Banyak memberikan pengaruh terhadap pengembangan profesional guru PKN . Baik aspek keilmuannya maupun dalam mengembangkan kemampuan guru dan dosen. Telah memiliki program pendidikan magister dan doktor, pemikiran reflektif empirik selama ini, dalam berbagai tulisan dan kegiatan ilmiah dalam AP3NI, antar lain sebagai berikut;

- a. Prodi Pendidikan Kewarga Negara sebagai Lembaga Pendidikan guru PKN pada LPTK memiliki pengalaman keparan dan potensi kelembagaan dalam mempersiapkan guru dosen dan pakar PKN profesional.
- b. Profesionalitas guru dosen menentukan keberhasilan revitalisasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran perlu direvitalisasi secara sistemik dengan dukungan kekuatan filosofik dan keilmuan.
- c. Pendidikan Guru PKN yang profesional dikembangkan dalam tradisi pendidikan Guru bertaraf Universitas. Merupakan aset bagi mengembangkan guru sebagai subyek yang mampu berkembang dalam melakukan inovasi kreatif dalam memperkuat mutu pembelajaran.
- d. Komunitas keilmuan pendidikan Kewarganegaraan mampu melahirkan pemikiran bagi pengembangan kekokohan filsafat ontologis, aksiologis dan epistemologis. Dapat keluar dari cengkaman Positivisme yang memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan jenis pengetahuan yang paling tinggi tingkatannya, dan karenanya kajian filsafat harus juga bersifat

ilmiah (*that science is the highest form of knowledge and that philosophy thus must be scientific*).

- e. PKn profetik berbasis nilai kewahyuan yang praktisnya dalam kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia. Yang sudah terbukti memiliki eksistensi dan kekuatan sebagai sumber dan modal sosial bagi sistem sosial dalam masyarakat Indonesia. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia seperti diatur dalam UUD 1945.
- f. Positivisme hanya metode ilmiah yang berlaku secara umum, untuk segala bidang atau disiplin ilmu, yang lazim digunakan dalam ilmu alam. Pandangan inilah yang menyamakan bidang ilmu sosial, ilmu pendidikan termasuk ilmu keguruan dan program pengembangan kurikulum pendidikan. Ternyata berdampak memperlemah pendidikan ilmu sosial termasuk dalam Ilmu kewarga negaraan. Kondisi ini memunculkan *pendekatan alamiah* dalam merevitalisasi epistemologinya, sehingga ditemukan pendekatan dan model *Naturalistic Inquiry*.
- g. Diduga paham positivisme dan kognitivisme memperlemah penelitian pembelajaran pendidikan kewarga negaraan, yang dibawa ke arah pemikiran ilmu pasti sehingga tercabut dari akar dan latar sosial budayanya. Karena positivisme memandang metafisik tidak dapat diterima sebagai ilmu, tetapi "*sekadar*" merupakan *pseudoscientific*. bertentangan dengan hakekat ilmu sosial dan Ilmu kewarga negaraan sebagai pendidikan nilai sosial dan budaya. Pendidikan kahlak mulia warga negara Indonesia berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa..

2.6. Paradigma Baru Revitalisasi PKn Sebagai Pendidikan Ideologi dan Pengembangan Pembelajaran Nilai Kebangsaan Pancasila

Diperlukan paradigma baru dalam upaya melakukan revitalisasi Pendidikan Kewarga negaraan. Perlu diperkuat dengan berlandaskan pemikiran filosofik epistemologi, yang berhubungan dengan ilmu pendidikan ilmu keguruan dan ilmu sosial humaniora dan agama sebagai sumber nilai untuk membangun paradigma baru. Antara lain didasarkan atas pemikiran sebagai berikut;

- a. Perlu dilakukan transformasi orientasi pemikiran dari *mengajar kepada belajar* dengan memperankan peserta didik sebagai *subyek pembelajar* yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dirinya *secara kolektif dalam belajar kelompok*. Agar mampu menginternalisasikan nilai kebangsaan Indonesia berdasarkan nilai nilai Pancasila
- b. Kemampuan *berpikir kritis dan kreatif* dan nilai karakter Pancasilais paham kebangsaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar membangun akhlak mulia warga negara dapat dikembangkan, jika pembelajaran PKn berhasil menciptakan iklim belajar yang terbuka, demokratis, kompentitif berorientasi kepada proses belajar peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi kapasitas dan kapabilitas dirinya sendiri berbasis nilai musyawarah dan mufakat dalam interaksi edukatif.

- c. Pengembangan nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn, akan efektif apabila nilai-nilai yang melekat pada setiap konsep bahasan materi pelajaran dijadikan media stimulus bagi terjadinya klarifikasi dan penalaran nilai sebagai proses pengembangan kemampuan menginternalisasikan dan internalisasi nilai.
- d. Sistem Nilai sebagai substansi pembelajaran akan penuh makna jika mengakses Nilai Nilai keagamaan sebagai sumber pembelajaran nilai Pancasila. Pengembangannya hendaknya dilakukan melalui upaya transformasi budaya belajar yang berbasis masalah aktual kewarganegaraan.
- e. Nilai-nilai nilai keagamaan dan masalah kebangsaan dijadikan sumber nilai memperkaya setiap konsep materi PPKn dijadikan sebagai bahan kajian yang menarik dalam proses belajar, manakala hakekat PPKn sebagai pendidikan nilai kebangsaan berdasarkan nilai keimanan dan Ketaqwaan dan ahlak mulia warganegara Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- f. Pendekatan pendidikan ideologi diperkokoh dengan pandangan terhadap pesertadidik sebagai subyek yang berfikir, bertindak, kreatif, konstruktif, dan manipulative, untuk membangun kecerdasan dan wawasan kebangsaan.
- g. PPKn akan memiliki kekuatan penuh daya apabila berhasil pembelajarannya mentransformasikan Nilai nilai kebangsaan meliputi makna kebangsaan Pancasila dan masalah praksis kebangsaan yang tumbuh dan berkembang sebagai latar masalah kewarganegaraan dijadikan sumber untuk memperkuat pembelajaran nilai dan wawasan kebangsaan .

2.7. . Inovasi Pembelajaran Pembelajaran Nilai kebangsaan dalam PPKn

Memperkokoh Sistem Nilai kebangsaan, Inovasi perlu dilakukan, dengan berorientasi pada penyempurnaan dan peningkatan kualitas pembelajaran dari pengalaman yang ada, dengan dukungan penelitian dan evaluasi implementasi kurikulum, konsepsinya antara lain sebagai berikut;

- a. Inovasi pembelajaran perlu melibatkan secara optimal, guru sebagai inisiator dan inovator pembelajaran dengan memberikan peluang untuk mengembangkan kreatifitasnya, pengembangkan profesional dengan menghormati otonomi dalam melakukan inovasi pembelajaran.
- b. Inovasi pembelajaran hendaknya dilaksanakan merupakan jawaban strategis untuk mengimbangi pengembangan pembelajaran dengan pendekatan masalita selama ini, sekaligus menjawab tantangan dunia pembelajaran nilai kebangsaan dan akhlak mulia warga negara.
- c. Arah pengertian konseptual pembelajaran PPKn harus bermakna “sebagai pembelajaran nilai nilai Pancasila, ilmu-ilmu sosial, humaniora teknologi dan serta nilai sosial budaya yang diorganisir secara kontekstual dengan nilai nilai keagamaan dengan dukungan ilmu keguruan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan membangun sistem nilai kebangsaan Pancasila sebagai pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship Education) di Indonesia.

- d. Inovasi pembelajaran ke arah memperkuat daya dukung sumber pembelajaran pengembangan model berpikir induktif berbasis pemecahan masalah dan nilai-nilai kebangsaan aktual
- e. Inovasi pembelajaran hedaknya mengakses pada strategi pengembangan berpikir tingkat tinggi untuk dapat menguasai IPTEKS, dengan mengutamakan membangun peningkatan keimanan dan ketakwaan dan kahlak mulia sebagai karakter PKn dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila

2.8. Paradigma Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila.

Gagasan konseptual untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan Ideologi Pancasila dan pembelajaran nilai kebangsaan. Paradigma Revitalisasi PKn Sebagai Ideologi Pancasila, dalam penguatan nilai dan wawasan kebangsaan, antara lain sebagai berikut'

- a. Ideologi Pancasila memiliki kekuatan filosofik menangkal pengaruh negatif ideologi asing termasuk "neoideology"
- b. Warga Negara Indonesia memerlukan kecerdasan berideologi Pancasila dengan berpikir tingkat tinggi dan Menggunakan sistem nilai yang kokoh dalam memecahkan masalah Kewarganegaraan
- c. Pancasila merupakan Ideologi Terbuka memiliki makna memberikan peluang bagi PKn Membangun Suasana Pembelajaran untuk Mencerdaskan kehidupan berideologi Pancasila
- d. Kecerdasan berideologi Pancasila Diperlukan untuk memperkuat aktualisasi Ideologi Pancasila berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernilai yang mendalam
- e. Ideologi Pancasila memberikan dukungan warga negara mampu melakukan interpretasi dan memecahkan masalah bernegara dan berbangsa, Kemampuan ini akan tumbuh melalui berpikir filsafat dan berpikir kreativitas dalam mengaktualisasikannya
- f. Pendidikan Ideologi Pancasila adalah merupakan salah satu pendekatan Dalam memperkuat PPKn (Citizenship education) . Intinya transformasi dalam Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
- g. Pendekatan ini dinilai tepat, sebab Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka memerlukan dukungan kemampuan berpikir kritis warga negara dan memperkuat berpikir kreatif dalam menemukan pola aktualisasinya dalam memecahkan masalah kewarga negaraan
- h. Ideologi Pancasila memberikan dukungan warga negara mampu melakukan interpretasi dan memecahkan masalah bernegara dan berbangsa, Kemampuan ini akan tumbuh melalui berpikir filsafat dan berpikir kreativitas dalam mengaktualisasikannya
- i. Pendidikan Ideologi Pancasila adalah merupakan salah satu pendekatan Dalam memperkuat PKN Citizenship. Intinya transformasi dalam Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran

- j. Pendekatan ini dinilai tepat, sebab Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka memerlukan dukungan kemampuan berpikir kritis warga negara dan memperkuat berpikir kreatif dalam menemukan pola aktualisasinya dalam memecahkan masalah kewarga negaraan
- k. Rational dan Strategi Revitalisasi PKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila ,
 - (a) Analisis filsafat dan etika Politik sistem politik dan Praktika Politik banyak dipengaruhi oleh pola pikir dan budaya Liberalistik. (b) Pengaruh ini menguat dan merupakan dampak negatif dari eporia proses reformasi termasuk reformasi konstitusional . (c) memunculkan sistem dan praktika politik biaya tinggi, dan tidak terkontrol oleh etika politik Pancasila

2.9. Makna Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Pembelajaran Nilai Kebangsaan dalam Pendidikan Kewarga Negaraan di Indonesia.

Berikut ini makna Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila, sebagai pememikiran reflektif bagi revitalisasi. Antara lain sebagai berikut;

- a. Pendekatan untuk memperkuat epistemologi Ilmu Kewarga Nengaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan
- b. Pendekatan dalam mengembagangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn dan Pengembangan mutu Pendidikan Guru PKn
- c. Secara Teoretik untuk mengembangkan Karakter Ideologi Pancasila warga negara Indonesia
- d. Untuk memperkuat peran dan makna PKn sebagai Pendidikan Nilai dan karakter Ideologi Pancasila
- e. Sebagai Pendekatan Untuk memperkuat posisi dan peran PKn dalam memperkuat ideologi Pancasila dalam Percaturan Ideologi dunia
- f. Sebagai Pendekatan PKn dalam membangun kecerdasan dan keterampilan berideologi Pancasila.
- g. Sebagai sebuah gagasan konseptual ilmu kewarganegaraan untuk memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan. Praktek dan Aktualisasi Pancasila Sebagai IdeologiSelama ini berada dalam suasana pengaruh pergumulan ideologi di dunia termasuk “Neo Ideology”
- h. Memerlukan dukungan yang kuat dengan kemampuan dan kecerdasan warga negara berideologi Pancasila untuk menghadapi pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Unuk itu Pengembangan Kualitas Kecerdasan Berideologi Pancasila warga negara sangat penting dalam PKnperlu revitalisasi PKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila

3 SIMPULAN

Kajian ini berkaitan dengan bagaimana upaya membangun pemikiran akademik untuk revitalisasi Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan Nilai kebangsaan. Berkaitan dengan perubahan nilai sosial politik dan budaya yang dipercepat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Implikasinya terhadap perkembangan paradigma dan pendekatan dalam Ilmu sosial, pendidikan IPS, Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kajian ini

mengedepankan paradigma revitalisasi pembelajaran nilai bagi penguatan nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan *ideologi Pancasila dan pendidikan watak bangsa*. Kajian ini bertujuan memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai kebangsaan dengan mengkonstruksi pendidikan ideologi Pancasila. Aktualisasinya dalam merancang bangun model pembelajaran dalam pembelajaran pemecahan masalah kewarganegara aktual, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tepatguna sesuai dengan tujuan membangun warga negara yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Ersis Warmansyah (Ed.) (2016) *Developing Education Based on Nationalism Values*, ULM,
Banjarmasin
- Suwarma(2013) *Etika Politik*, Gelar Pustaka Mandiri Bandung
 (2015) *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustala Mandiri
 (2016) *Ideologi Pancasila* Gelar Pustaka Mandiri, Bandung
 (2016) *Revitalisasi PKN sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila dan Implikasinya terhadap Sistem Pendidikan Guru*, Makalah disajikan pada Seminar Internasional
 Kongres AP3KNI Indonesia, Bandung Tanggal 15 November 2016
 (2016) *Paradigma Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspekti Globalisasi Kajian Epistemologik dan Paradigmatik Revitalisasi PKN*, makalah Kuliah Umum 18 Agustus 2016 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia
 (2017) *Ilmu Kewarganegaraan (Ontologis dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan)*, Univeritas Pendidikan Indonesia, Bandung
 (2017) *Pendidikan Kewarganegraan (Refleksi Inovasi dan Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan)* Universitas Pendidikan Indonesia
 (2017) *Building Character and Value Education Based on School and Social culture*, Presented in Internasional Seminar on Pasundan Univercity, Juni 16 -2017 Bandung
 (2017) *Model Buku Ajar PPKN Berbasis Ke Islaman dan Kemubammadiyah*an Untuk Perguruan Tinggi, Disajikan dalam Disajikan pada Forum Group Diskusi di UHAMKA, Jakarta 14 Juni 2017